

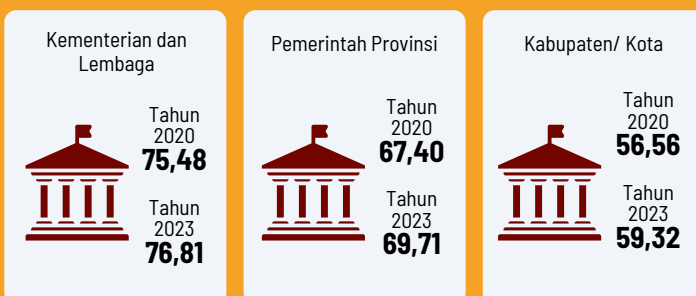


ESTAFET REFORMASI BIROKRASI DALAM Mendukung ASTA CITA

Pendahuluan

Road Map Reformasi Birokrasi telah memasuki masa akhir periode penerapan yakni 2020-2024. Beberapa perubahan kebijakan telah dilakukan mulai dari Permenpan-RB No. 25 tahun 2020, hingga Permenpan-RB No. 3 tahun 2023. Reformasi birokrasi tahun 2024 yang mengacu kepada Permenpan-RB No. 3 tahun 2023 (RB tematik), berfokus pada 4 tema yaitu pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, digitalisasi pemerintahan, dan prioritas aktual presiden.

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2023



Sumber : Diolah dari Berbagai Sumber
Gambar 1. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi K/L/D/ tahun 2023

Tim Penyusun

- Tri Wahyuni
- Rustan Amarullah
- Dewi Sartika

Ditujukan Kepada

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Ringkasan Eksekutif

Hasil survei persepsi publik terkait kinerja pembangunan, menempatkan 12 komponen pembangunan yang disoroti oleh masyarakat untuk ditingkatkan. Policy Brief ini memilih 3 komponen sebagai fokus pembahasan untuk dapat diakomodir di Road Map RB selanjutnya. Pemilihan tiga komponen dengan memperhatikan capaian yang masih belum optimal serta adanya keterkaitan dengan Asta Cita.

Terdapat beberapa alternatif kebijakan untuk melanjutkan dan menguatkan Road Map RB Periode 2025 - 2029 : (1) perlu penetapan target RB 2025-2029 serta Tambahan 2 Tematik Baru, yakni peningkatan SDM berkualitas dan Peningkatan produktivitas pangan menuju swasembada pangan. (2) Menyiapkan Regulasi dan Pedoman Pelaksanaan RB 2025-2029, (3) Melengkapi data yang akurat, (4) Menyiapkan perangkat pemantauan kinerja capaian RB 2025-2029. Sosialisasi terhadap RB juga harus segera dilakukan, sesaat setelah kebijakan ditetapkan.



Daerah yang menerapkan RB tematik signifikan mencatatkan angka kemiskinan rata-rata 5,16 persen, jauh di bawah rata-rata nasional. Implementasi RB tematik juga berkontribusi 63 persen dari total peningkatan investasi di Indonesia. Sementara pada sektor pengadaan PDN, penerapan RB tematik meningkatkan realisasi PDN sebesar 14 persen dari tahun sebelumnya dari 76 menjadi 90,34. Keseluruhan area tematik tersebut ditopang oleh Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan langkah dalam penerapan digitalisasi.

Deskripsi Masalah

Evaluasi paruh waktu RPJMN 2020-2024 berdasarkan hasil survei persepsi publik terkait kinerja pembangunan yang perlu ditingkatkan ke depan, menempatkan 12 komponen pembangunan yang disoroti oleh masyarakat yaitu : penurunan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, kesejahteraan di desa dan 3T, akses pangan, peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, perlindungan anak dan perempuan, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, efisiensi energi dan ketenagalistrikan, penanganan kerusakan lingkungan, penguatan kelompok masyarakat tangguh bencana dan perubahan iklim, penguatan sistem anti-korupsi dan penegakan hukum, serta penguatan tata kelola pelayanan publik.

Policy brief ini mencoba mengkombinasikan sebagian dari 12 komponen tersebut untuk menjadi titik fokus yang akan diakomodasikan ke dalam Roadmap RB Tematik selanjutnya, mengingat komponen tersebut ada keterhubungan dengan Asta Cita Presiden baru Indonesia.

1. Belum terakomodasinya Persoalan Akses Pangan dan Kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan Secara Spesifik ke Dalam RB Tematik Tahun 2023

Akses pangan dapat menyebabkan krisis pangan dan berpengaruh terhadap stabilitas sosial hingga stabilitas politik sebuah negara. Aksesibilitas penduduk terhadap pangan sangat ditentukan oleh sistem logistik nasional (berkaitan dengan sistem distribusi, sarana dan prasarana transportasi serta pergudangan).

Kenyataan saat ini sarana dan prasarana yang mendukung sistem logistik nasional tersebut dapat dikatakan belum memadai, baik dilihat dari kapasitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu akses penduduk terhadap bahan pangan, terutama untuk daerah daerah terpencil, masih belum maksimal, terjadi perbedaan harga yang cukup tinggi antara daerah surplus dengan daerah defisit (Miyasto, 2014).

2. Belum Optimalnya Pencapaian RB di K/L/D

Kebijakan pelayanan publik telah banyak dilahirkan. Program reformasi birokrasi sebagai motor penggerak tata kelola pelayanan publik juga sudah mengalami traformasi. Reformasi birokrasi yang awalnya berada di tataran output (RB General), berubah ke RB Tematik, yang diharapkan mampu memberikan dampak. Dalam perjalanannya, hingga saat ini, baik RB General maupun RB Tematik, masih belum dapat berjalan seratus persen.

Kementerian PANRB mengidentifikasi beberapa catatan dan temuan penting. Terdapat 194 K/L/D yang capaian rencana aksi RB General kurang dari 50% (dengan 94 K/L/D diantaranya memiliki capaian/realisasi renaksi adalah 0%) selain itu, terdapat 180 K/L/D yang capaian renaksi dan capaian output RB Tematik kurang dari 50% (dengan 109 diantaranya memiliki capaian renaksi 0%). Sekitar 92 Instansi Pemerintah (14,75%) belum juga melaksanakan RB Tematik pada tema apapun (Menpan.go.id, 2024).

Tindak Lanjut Evaluasi RPJMN 2020-2024

Peningkatan Akses Pangan



Target 2021
3,61 %

Target 2024
5,97 %

Tantangan :
Distribusi, Sapras
Transportasi, Pergudangan

Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik



Capaian Rencana Aksi RB General **<50 % 194 K/L/D**

Capaian Rencana Aksi RB Tematik **<50 % 180 K/L/D**

Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan



Angka Prevalensi Stunting Masih Tinggi
Target (2024) **14%**
Capaian (2023) **21,5%**



Angka Partisipasi Sekolah
SD 0,13%
SMP 1,06%
SMA 1,38%

Sumber : Diolah dari Berbagai Sumber
Gambar 3. Fokus Tindak Lanjut Evaluasi RPJMN 2020 - 2024



Alternatif Solusi

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka melanjutkan kebijakan reformasi birokrasi yang berdampak pada upaya memenuhi harapan masyarakat, perlu diterapkan langkah-langkah strategis yang terukur, terencana, dan berkesinambungan. Berikut beberapa alternatif kebijakan dalam rangka penguatan Road Map Reformasi Birokrasi periode 2025-2029.

Alternatif 1: Penetapan Target RB 2025-2029 serta Tambahan 2 Tematik Baru

Menghadapi tantangan 2025-2029, maka road map RB 2025-2029 perlu mengakomodir harapan asta cita pemerintahan yang baru. Jika RB sebelumnya ditetapkan target "Menuju *World Class Bureaucracy*" pada Tahun 2024, maka pada desain RB 2025-2029 direkomendasikan Target RB baru 2025-2029 adalah "Birokrasi Cerdas dan Terhubung". Target ini dinilai sangat relevan karena menekankan aspek teknologi dan konektivitas serta menunjukkan birokrasi yang lebih efisien dan responsif.

Alternatif 2: Melanjutkan RB Tematik dengan Tambahan 2 Tema Baru Asta Cita

Mendorong RB semakin berdampak pada periode 2025-2029, maka selain 4 tematik yang ada eksisting yakni penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, dan prioritas presiden (PDN dan pengendalian inflasi), perlu ditambahkan dua tematik baru yaitu (1) peningkatan SDM berkualitas, dan (2) Peningkatan produktivitas pangan menuju swasembada pangan. Kedua tema baru tersebut perlu ditetapkan target dan sasarnya, dengan demikian arah RB 2025-2029 juga turut mengakselerasi asta cita pemerintahan baru.

Alternatif 3: Menyiapkan Regulasi dan Pedoman Pelaksanaan RB 2025-2029

Dalam rangka mempercepat serta mempermudah aktualisasi 6 tema RB 2025-2029 tersebut, diperlukan regulasi serta pedoman pelaksanaannya. Regulasi dan pedoman pelaksanaan RB tersebut diperlukan untuk memberikan arah dan landasan yang jelas bagi setiap instansi pemerintah dalam menjalankan reformasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Bagi instansi yang sebelumnya belum menunjukkan hasil positif pelaksanaan RB hingga tahun 2024, harapannya dengan pedoman pelaksanaan RB baru 2025-2029 yang lebih rinci dan jelas akan dapat memudahkan aktualisasinya di seluruh instansi yang ada. Disisi yang lain, diharapkan regulasi dan pedoman pelaksanaan RB 2025-2029 tersebut dapat segera diterbitkan dan dijalankan diawal tahun sehingga dapat dimasukkan dalam skema perencanaan dan penganggaran seluruh instansi.

Selanjutnya, dalam proses penyusunan regulasi dan pedoman tersebut diperlukan kolaborasi dengan berbagai stakeholders terkait sebab Reformasi birokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga non-pemerintah. Kolaborasi dengan stakeholders ini perlu dijadikan bagian dari roadmap agar setiap kebijakan lebih mudah diterima dan diimplementasikan.

Alternatif 4: Melengkapi Data Yang Akurat Dalam Rangka Penetapan Ukuran Keberhasilan RB 2025-2029

Roadmap sebaiknya mengedepankan pendekatan berbasis data dan kebijakan adaptif yang dapat berubah sesuai kebutuhan dan tantangan baru. Tersedianya data yang akurat menjadi landasan pokok dalam menetapkan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi 2025-2029. Data yang valid dan terkini akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi pencapaian maupun tantangan yang dihadapi dalam proses reformasi.

Melalui data yang tepat, proses evaluasi dan pemantauan kinerja setiap instansi dapat dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga perbaikan yang diperlukan dapat segera diimplementasikan. Selain itu, data akurat memungkinkan pemerintah untuk merancang strategi yang lebih efektif dan memastikan setiap langkah kebijakan berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada aspek yang lain diharapkan Roadmap RB 2025-2029 juga memetakan perencanaan alokasi sumber daya yang baik agar setiap program dalam reformasi dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.



Alternatif 5: Menyiapkan perangkat pemantauan kinerja capaian RB 2025-2029

Roadmap RB 2025-2029 perlu memasukkan sistem pemantauan dan evaluasi yang sistematis untuk mengukur progres reformasi. Sistem ini bisa berbentuk perangkat digital yang mempermudah proses pelaporan dari tiap instansi, memastikan adanya feedback loop yang efektif, dan mendukung transparansi. Dengan adanya perangkat pemantauan yang efektif, pemerintah dapat secara sistematis mengukur, mengevaluasi, dan mengidentifikasi kendala atau keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemantauan ini juga membantu memastikan bahwa upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dilakukan secara berkesinambungan dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Rekomendasi

Dari alternatif yang ditawarkan, penulis merekomendasikan alternatif terkait peningkatan SDM berkualitas serta Peningkatan produktivitas pangan menuju swasembada pangan sebagai tema kebijakan RB tematik selanjutnya. Sosialisasi terhadap RB Tematik juga harus segera dilakukan, sesaat setelah kebijakan ditetapkan. Berkaca dari penerapan RB Tematik sebelumnya, proses memahami dan mengimplementasikannya kebijakan RB Tematik di seluruh provinsi/kabupaten dan kota membutuhkan waktu yang tidak cepat.

Terlebih di Tahun 2025 banyak hadir para kepala daerah baru yang tentu masih berjibaku dengan visi – misinya. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kemenpan RB perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mendesain kebijakan RB Tematik baru dan segera mensosialisasikannya. Dengan demikian langkah konkrit birokrasi dalam berkontribusi terhadap pencapaian Asta Cita dapat terlihat nyata.

Daftar Pustaka

- Miyasto, 2014, Strategi Ketahanan Pangan Nasional guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 17 Maret 2014
- M. Tawarika, dkk, 2024, Upaya Pencegahan Putus Sekolah Melalui Diagnosis Dini Kebutuhan Pembelajaran, Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 1, No. 4 Mei 2024, Hal. 39-43 DOI: <https://doi.org/10.62017/arima>
- Renstra Kementan 2020 – 2024, <https://bpmsph.ditjenpkh.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2023/10/RENSTRA-KEMANTAN-2020-2024-REVISI-2-26-Agt-2021.pdf>
- https://www.setneg.go.id/baca/index/buka_rakornas_stunting_wapres_ungkap_keberhasilan_pemerintah_turunkan_prevalensi_lima_tahun_terakhir#:~:text=Senada%20dengan%20hal%20tersebut%2C%20Menteri,14%25%20pada%20akhir%202024%20ini.
- <https://nasional.tempo.co/read/1866239/menkes-jelaskan-penyebab-rendahnya-penurunan-angka-prevalensi-stunting...> Jumat, 10 Mei 2024 17:26 WIB
- Evaluasi Reformasi Birokrasi 2024 Tetap Berfokus Pada Pengukuran Dampak
- <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/evaluasi-reformasi-birokrasi-2024-tetap-berfokus-pada-pengukuran-dampak>